



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU NARWANTA
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT INVESTIGASI INTERNAL
3. NHK : 95518

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.949.167.260**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 691 m2/234 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 357.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.180.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 279.513.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 147.440.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 442.312.000
6. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 38.861.130
7. Tanah Seluas 3 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 38.861.130
8. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/55 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 352.600.000**

1. MOBIL, DAIHATSU FEROZA JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOBIL, DATSUN GO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOBIL, XENIA MPV Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000



4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
162.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.039.500.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 236.420.205

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.593.187.465

III. HUTANG Rp. 761.900.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.831.287.465

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.